



KEPUTUSAN  
SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
NOMOR 19 TAHUN 2025  
TENTANG  
PETA JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, perlu dilakukan penyesuaian peta jabatan di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sesuai dengan prioritas kebutuhan organisasi;
- b. bahwa peta jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, disusun berdasarkan nomenklatur jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa Keputusan Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 24 Tahun 2024 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila belum mengakomodasi kebutuhan jabatan sesuai kebutuhan organisasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Peta Jabatan di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
4. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938);
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 497);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 282 Tahun 2025 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG PETA JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.
- KESATU : Menetapkan Peta Jabatan di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang selanjutnya disebut Peta Jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Peta Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan untuk:
- a. menentukan prioritas kebutuhan pegawai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun; dan
  - b. menjadi pedoman penataan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
- KETIGA : Peta Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja organisasi.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 24 Tahun 2024 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 November 2025

SEKRETARIS UTAMA,



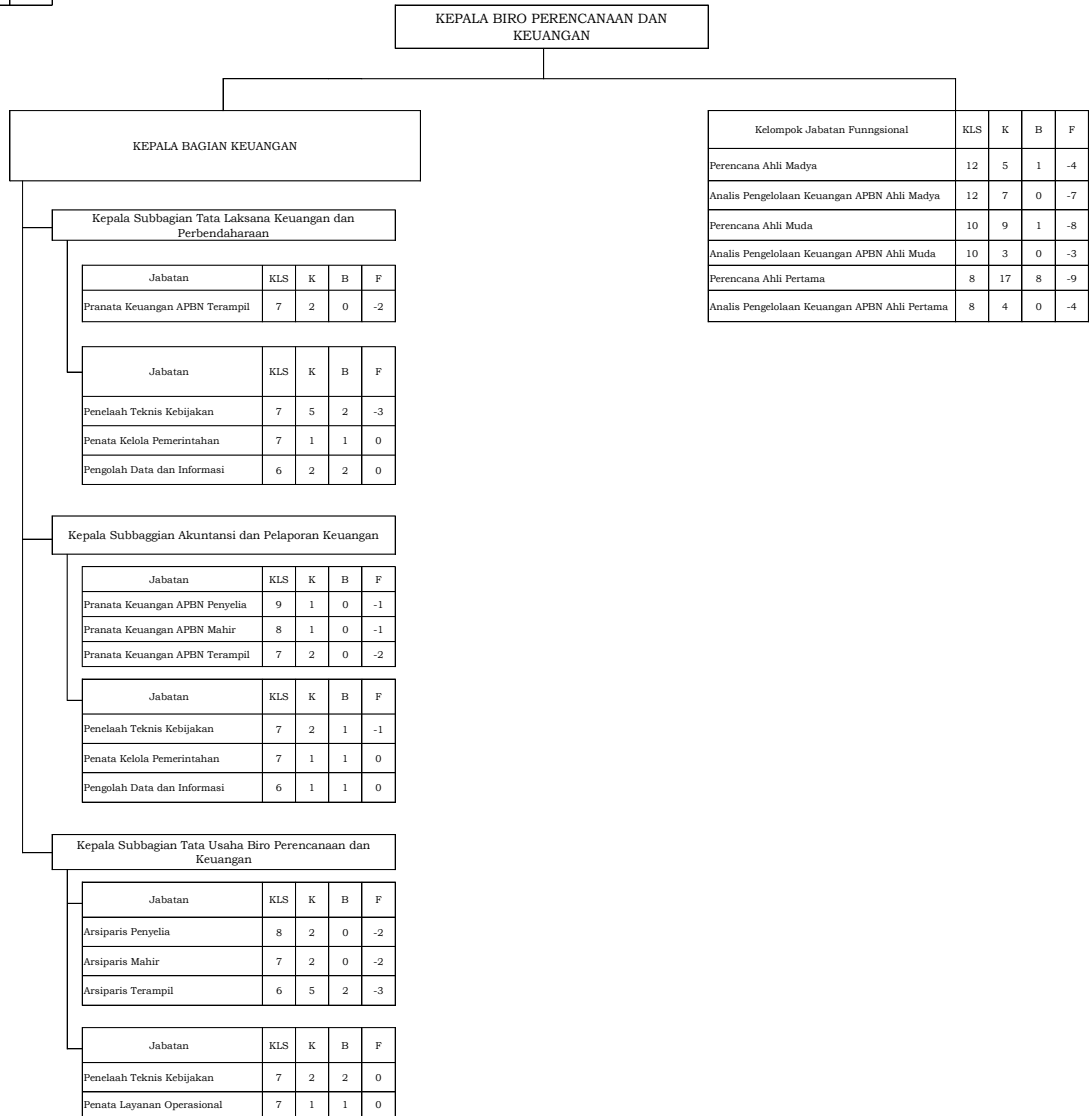
TONNY AGUNG ARIFianto

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA  
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
NOMOR 19 TAHUN 2025  
TENTANG  
PETA JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN  
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

PETA JABATAN  
DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

# 1. Biro Perencanaan dan Keuangan

No	Jabatan	K
1	JPT Pratama	1
2	Administrator	1
3	Pengawas	3
4	Fungsional	60
5	Pelaksana	15
Total		80



Keterangan:

KLS : Kelas Jabatan

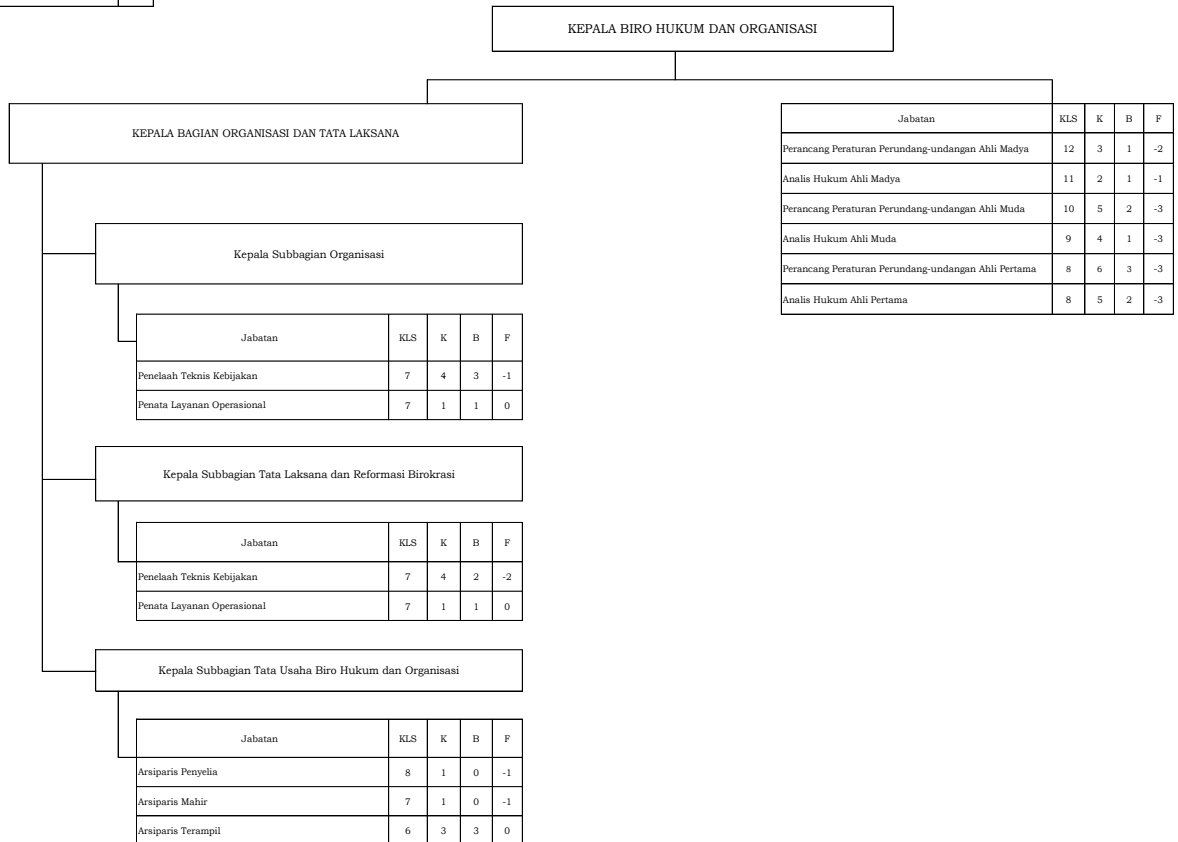
K : Peta Jabatan

B : *Bezzeting/ Existing* Pegawai

F : Formasi

## 2. Biro Hukum dan Organisasi

No	Jabatan	K
1	JPT Pratama	1
2	Administrator	1
3	Pengawas	3
4	Fungsional	30
5	Pelaksana	10
Total		45



**Keterangan:**

KLS : Kelas Jabatan

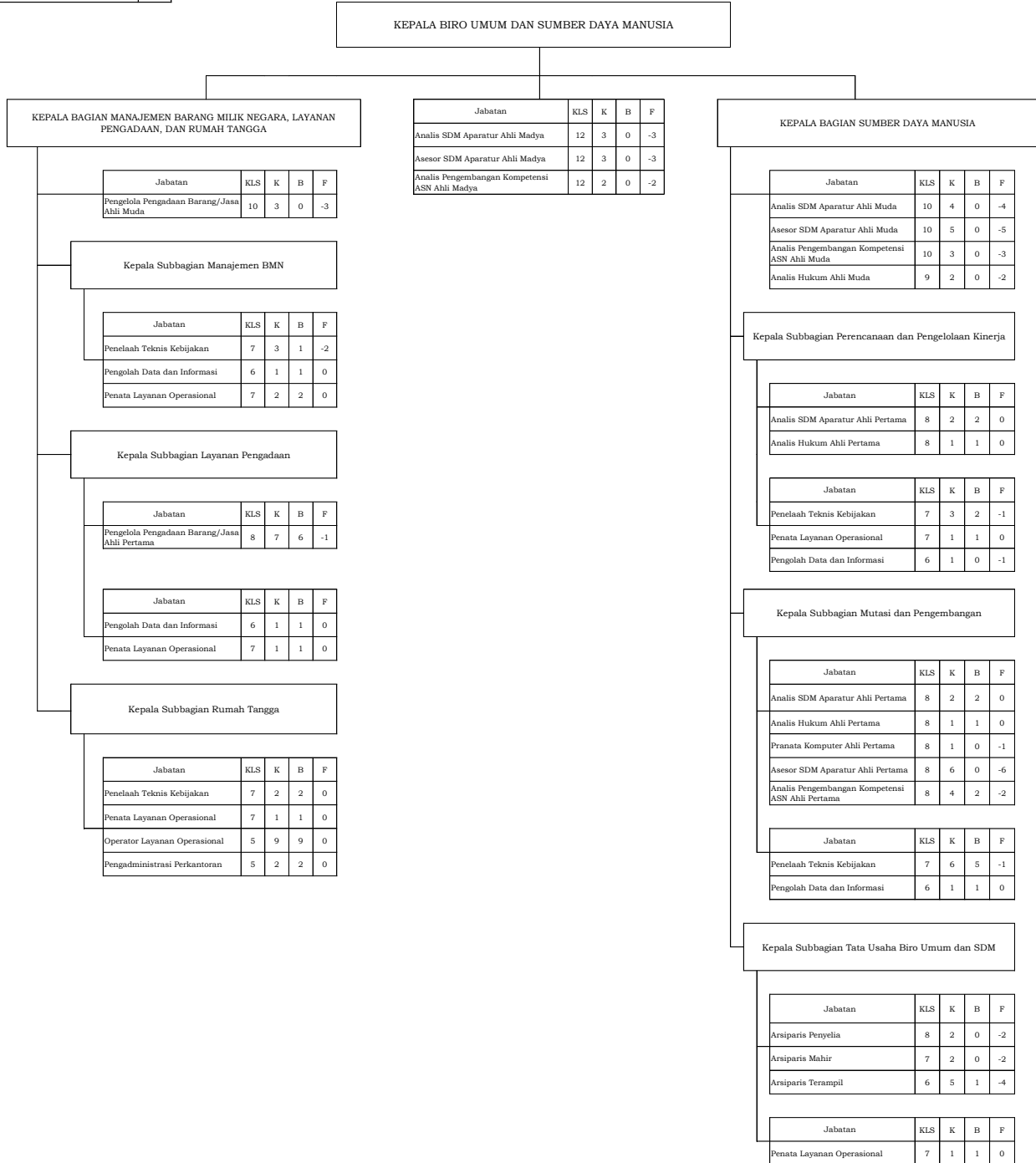
K : Peta Jabatan

B : *Bezzeting/ Existing* Pegawai

F : Formasi

### 3. Biro Umum dan Sumber Daya Manusia

No	Jabatan	K
1	JPT Pratama	1
2	Administrator	2
3	Pengawas	6
4	Fungsional	58
5	Pelaksana	35
Total		102



**Keterangan:**

KLS : Kelas Jabatan

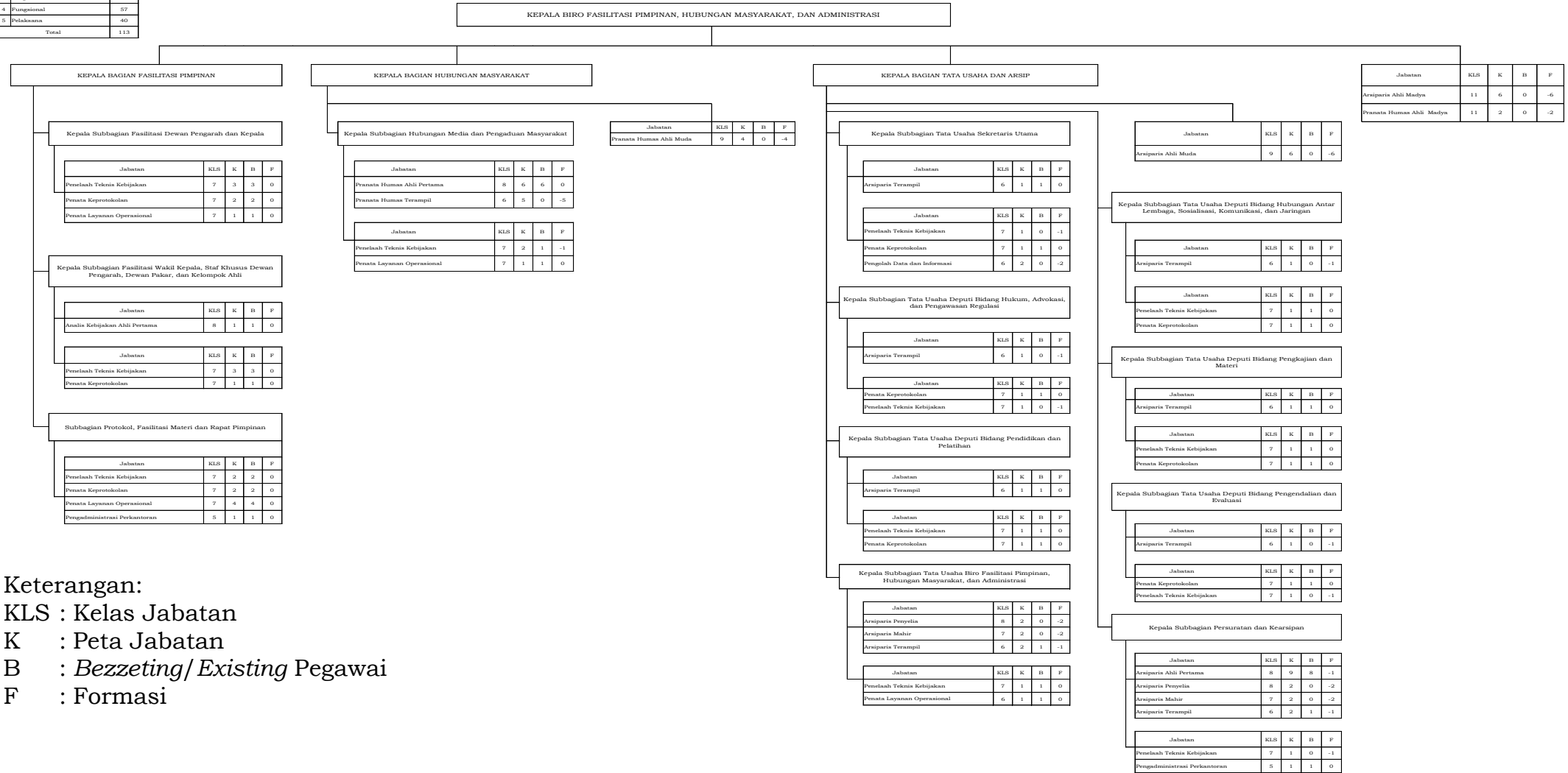
K : Peta Jabatan

B : *Bezzeting/ Existing* Pegawai

F : Formasi

#### 4. Biro Fasilitas Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi

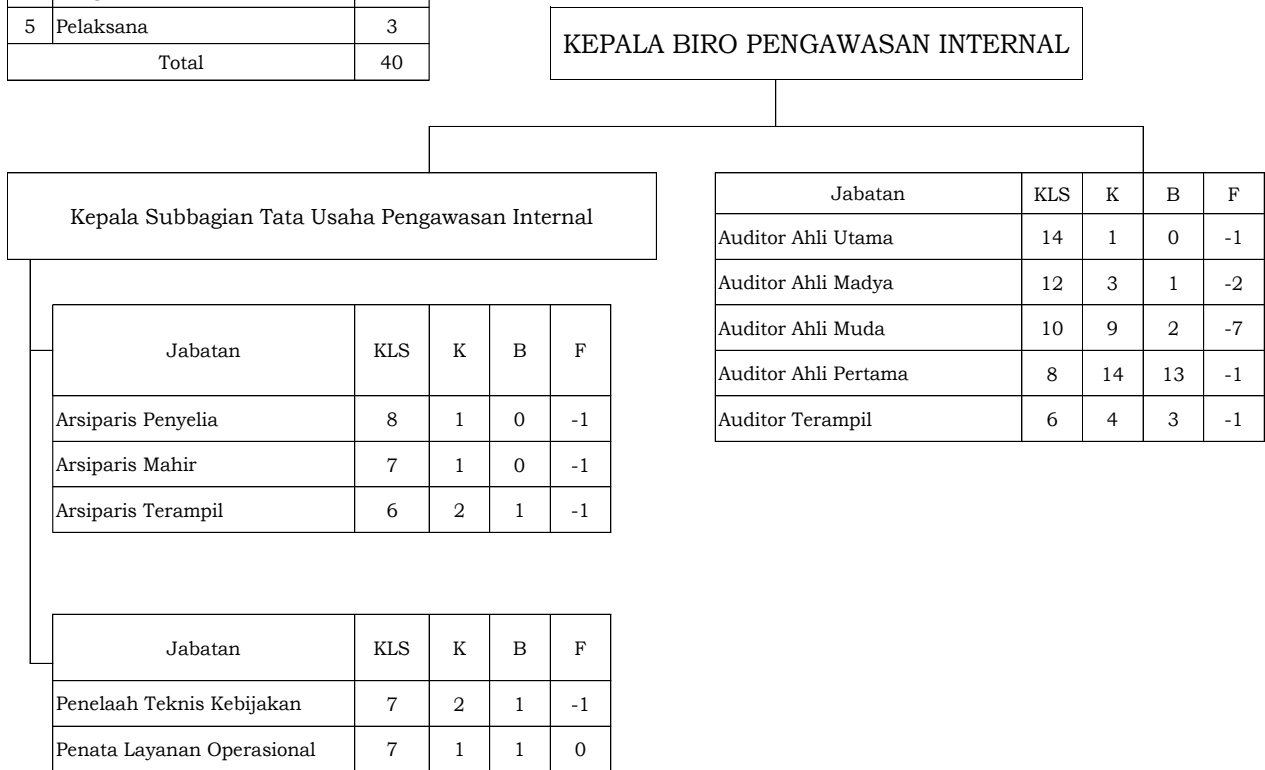
No	Jabatan	K
1	JPT Pratama	1
2	Administrator	3
3	Pengawas	12
4	Fungsional	57
5	Pelaksana	40
Total		113



**Keterangan:**  
 KLS : Kelas Jabatan  
 K : Peta Jabatan  
 B : *Bezzeting/ Existing* Pegawai  
 F : Formasi

## 5. Biro Pengawasan Internal

No	Jabatan	K
1	JPT Pratama	1
2	Administrator	0
3	Pengawas	1
4	Fungsional	35
5	Pelaksana	3
Total		40



**Keterangan:**

KLS : Kelas Jabatan

K : Peta Jabatan

B : *Bezzeting/ Existing* Pegawai

F : Formasi

## 6. Direktorat Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama

No	Jabatan	K
1	JPT Pratama	1
2	Administrator	0
3	Pengawas	0
4	Fungsional	19
5	Pelaksana	5
Total		25

DIREKTUR HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DAN KERJA SAMA				
Jabatan	KLS	K	B	F
Analisis Kebijakan Ahli Madya	12	2	1	-1
Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	2	0	-2
Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8	3	3	0
Analisis Kerja Sama Ahli Madya	12	2	0	-2
Analisis Kerja Sama Ahli Muda	10	3	0	-3
Analisis Kerja Sama Ahli Pertama	8	3	0	-3
Arsiparis Penyelia	8	1	0	-1
Arsiparis Mahir	7	1	0	-1
Arsiparis Terampil	6	2	1	-1
Jabatan	KLS	K	B	F
Penelaah Teknis Kebijakan	7	2	2	0
Penata Kelola Pemerintahan	7	1	1	0
Operator Layanan Operasional	5	1	1	0
Pengadministrasi Perkantoran	5	1	0	-1

**Keterangan:**

KLS : Kelas Jabatan

K : Peta Jabatan

B : *Bezzeting/ Existing* Pegawai

F : Formasi

## 7. Direktorat Sosialisasi dan Komunikasi

No	Jabatan	K
1	JPT Pratama	1
2	Administrator	0
3	Pengawas	0
4	Fungsional	16
5	Pelaksana	5
Total		22

DIREKTUR SOSIALISASI DAN KOMUNIKASI				
Jabatan	KLS	K	B	F
Analisis Kebijakan Ahli Madya	12	2	1	-1
Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	2	0	-2
Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8	4	4	0
Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	9	1	0	-1
Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	8	3	0	-3
Arsiparis Penyelia	8	1	0	-1
Arsiparis Mahir	7	1	0	-1
Arsiparis Terampil	6	2	0	-2
Jabatan	KLS	K	B	F
Penelaah Teknis Kebijakan	7	1	1	0
Penata Layanan Operasional	7	2	2	0
Pengelola Layanan Operasional	6	1	1	0
Pengadministrasi Perkantoran	5	1	1	0

**Keterangan:**

KLS : Kelas Jabatan

K : Peta Jabatan

B : *Bezzeting/ Existing* Pegawai

F : Formasi

## 8. Direktorat Jaringan dan Pembudayaan

No	Jabatan	K
1	JPT Pratama	1
2	Administrator	0
3	Pengawas	0
4	Fungsional	17
5	Pelaksana	8
Total		26

DIREKTUR JARINGAN DAN PEMBUDAYAAN				
Jabatan	KLS	K	B	F
Analisis Kebijakan Ahli Madya	12	4	1	-3
Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	4	0	-4
Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8	5	3	-2
Arsiparis Penyelia	8	1	0	-1
Arsiparis Mahir	7	1	0	-1
Arsiparis Terampil	6	2	1	-1
Jabatan	KLS	K	B	F
Penelaah Teknis Kebijakan	7	2	2	0
Penata Kelola Pemerintahan	7	2	2	0
Penata Layanan Operasional	7	4	4	0

### Keterangan:

KLS : Kelas Jabatan

K : Peta Jabatan

B : *Bezzeting/ Existing Pegawai*

F : Formasi

## 9. Direktorat Analisis dan Penyelarasan

No	Jabatan	K
1	JPT Pratama	1
2	Administrator	0
3	Pengawas	0
4	Fungsional	37
5	Pelaksana	7
Total		45

DIREKTUR ANALISIS DAN PENYELARASAN				
Jabatan	KLS	K	B	F
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Utama	14	0	0	0
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya	12	6	3	-3
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	10	12	0	-12
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	8	15	3	-12
Arsiparis Penyelia	8	1	0	-1
Arsiparis Mahir	7	1	0	-1
Arsiparis Terampil	6	2	0	-2
Jabatan	KLS	K	B	F
Penelaah Teknis Kebijakan	7	5	5	0
Penata Layanan Operasional	7	2	2	0

**Keterangan:**

KLS : Kelas Jabatan

K : Peta Jabatan

B : *Bezzeting/ Existing* Pegawai

F : Formasi

## 10. Direktorat Advokasi

No	Jabatan	K
1	JPT Pratama	1
2	Administrator	0
3	Pengawas	0
4	Fungsional	21
5	Pelaksana	4
Total		26

DIREKTUR ADVOKASI				
Jabatan	KLS	K	B	F
Analisis Hukum Ahli Madya	11	3	2	-1
Analisis Hukum Ahli Muda	9	5	0	-5
Analisis Hukum Ahli Pertama	8	6	4	-2
Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	1	0	-1
Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8	2	0	-2
Arsiparis Penyelia	8	1	0	-1
Arsiparis Mahir	7	1	0	-1
Arsiparis Terampil	6	2	2	0
Jabatan	KLS	K	B	F
Penelaah Teknis Kebijakan	7	2	1	-1
Penata Kelola Pemerintahan	7	1	1	0
Pengolah Data dan Informasi	6	1	1	0

**Keterangan:**

**KLS** : Kelas Jabatan

**K** : Peta Jabatan

**B** : *Bezzeting/ Existing* Pegawai

**F** : Formasi

## 11. Direktorat Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan Regulasi

No	Jabatan	K
1	JPT Pratama	1
2	Administrator	0
3	Pengawas	0
4	Fungsional	23
5	Pelaksana	4
Total		28

DIREKTUR PENYUSUNAN REKOMENDASI KEBIJAKAN DAN REGULASI				
Jabatan	KLS	K	B	F
Analisis Hukum Ahli Madya	11	3	2	-1
Analisis Hukum Ahli Muda	9	5	0	-5
Analisis Hukum Ahli Pertama	8	6	4	-2
Analisis Kebijakan Ahli Madya	12	1	0	-1
Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	2	0	-2
Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8	2	1	-1
Arsiparis Penyelia	8	1	0	-1
Arsiparis Mahir	7	1	0	-1
Arsiparis Terampil	6	2	2	0
Jabatan	KLS	K	B	F
Penelaah Teknis Kebijakan	7	3	3	0
Pengadministrasi Perkantoran	5	1	1	0

**Keterangan:**

KLS : Kelas Jabatan

K : Peta Jabatan

B : *Bezzeting/ Existing* Pegawai

F : Formasi

## 12. Direktorat Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila

No	Jabatan	K
1	JPT Pratama	1
2	Administrator	0
3	Pengawas	0
4	Fungsional	19
5	Pelaksana	10
Total		30

DIREKTUR PENGKAJIAN KEBIJAKAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA				
Jabatan	KLS	K	B	F
Analisis Kebijakan Ahli Utama	14	1	0	-1
Analisis Kebijakan Ahli Madya	12	4	2	-2
Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	5	0	-5
Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8	5	4	-1
Arsiparis Penyelia	8	1	0	-1
Arsiparis Mahir	7	1	0	-1
Arsiparis Terampil	6	2	0	-2

Jabatan	KLS	K	B	F
Penata Kelola Pemerintahan	7	1	1	0
Penelaah Teknis Kebijakan	7	9	9	0

**Keterangan:**

KLS : Kelas Jabatan

K : Peta Jabatan

B : *Bezzeting/ Existing* Pegawai

F : Formasi

### 13. Direktorat Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila

No	Jabatan	K
1	JPT Pratama	1
2	Administrator	0
3	Pengawas	0
4	Fungsional	19
5	Pelaksana	7
Total		27

DIREKTUR PENKAJIAN MATERI PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA				
Jabatan	KLS	K	B	F
Analisis Kebijakan Ahli Utama	14	1	0	-1
Analisis Kebijakan Ahli Madya	12	4	3	-1
Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	5	0	-5
Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8	5	3	-2
Arsiparis Penyelia	8	1	0	-1
Arsiparis Mahir	7	1	0	-1
Arsiparis Terampil	6	2	0	-2

Jabatan	KLS	K	B	F
Penelaah Teknis Kebijakan	7	7	7	0

**Keterangan:**

KLS : Kelas Jabatan

K : Peta Jabatan

B : *Bezzeting/ Existing* Pegawai

F : Formasi

#### 14. Direktorat Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila

No	Jabatan	K
1	JPT Pratama	1
2	Administrator	0
3	Pengawas	0
4	Fungsional	18
5	Pelaksana	9
Total		28

DIREKTUR PENGAJIAN IMPLEMENTASI PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

Jabatan	KLS	K	B	F
Analisis Kebijakan Ahli Madya	12	4	3	-1
Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	5	0	-5
Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8	5	3	-2
Arsiparis Penyelia	8	1	0	-1
Arsiparis Mahir	7	1	0	-1
Arsiparis Terampil	6	2	0	-2

Jabatan	KLS	K	B	F
Penelaah Teknis Kebijakan	7	6	6	0
Penata Kelola Pemerintahan	7	3	3	0

Keterangan:

KLS : Kelas Jabatan

K : Peta Jabatan

B : *Bezzeting/ Existing* Pegawai

F : Formasi

15. Direktorat Perencanaan, Standarisasi, dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan

No	Jabatan	K
1	JPT Pratama	1
2	Administrator	0
3	Pengawas	0
4	Fungsional	23
5	Pelaksana	5
Total		29

DIREKTUR PERENCANAAN, STANDARDISASI, DAN KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				
Jabatan	KLS	K	B	F
Analisis Kebijakan Ahli Madya	12	2	2	0
Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	2	0	-2
Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8	2	2	0
Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya	12	3	1	-2
Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda	10	4	0	-4
Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama	8	6	5	-1
Arsiparis Penyelia	8	1	0	-1
Arsiparis Mahir	7	1	0	-1
Arsiparis Terampil	6	2	1	-1
Jabatan	KLS	K	B	F
Penelaah Teknis Kebijakan	7	4	1	-3
Pengolah Data dan Informasi	6	1	1	0

Keterangan:

KLS : Kelas Jabatan

K : Peta Jabatan

B : *Bezzeting/ Existing* Pegawai

F : Formasi

## 16. Direktorat Penyelenggaraan Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka

No	Jabatan	K
1	JPT Pratama	1
2	Administrator	0
3	Pengawas	0
4	Fungsional	22
5	Pelaksana	12
Total		35

DIREKTUR PENYELENGGARAAN PROGRAM PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA				
Jabatan	KLS	K	B	F
Analisis Kebijakan Ahli Madya	12	4	2	-2
Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	4	0	-4
Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8	5	3	-2
Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda	10	2	0	-2
Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama	8	2	0	-2
Pranata Komputer Ahli Pertama	8	1	0	-1
Arsiparis Penyelia	8	1	0	-1
Arsiparis Mahir	7	1	0	-1
Arsiparis Terampil	6	2	1	-1
Jabatan	KLS	K	B	F
Penelaah Teknis Kebijakan	7	6	6	0
Penata Kelola Pemerintahan	7	5	5	0
Penata Layanan Operasional	7	1	1	0

**Keterangan:**

KLS : Kelas Jabatan

K : Peta Jabatan

B : *Bezzeting/ Existing* Pegawai

F : Formasi

## 17. Direktorat Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan

No	Jabatan	K
1	JPT Pratama	1
2	Administrator	0
3	Pengawas	0
4	Fungsional	25
5	Pelaksana	7
Total		33

DIREKTUR PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				
Jabatan	KLS	K	B	F
Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Utama	14	1	0	-1
Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya	12	4	1	-3
Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda	10	4	0	-4
Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama	8	4	4	0
Widyaiswara Ahli Madya	12	1	0	-1
Widyaiswara Ahli Muda	10	3	0	-3
Widyaiswara Ahli Pertama	8	3	3	0
Analisis Kebijakan Ahli Madya	12	1	1	0
Arsiparis Penyelia	8	1	0	-1
Arsiparis Mahir	7	1	0	-1
Arsiparis Terampil	6	2	2	0

Jabatan	KLS	K	B	F
Penelaah Teknis Kebijakan	7	2	2	0
Penata Kelola Pemerintahan	7	1	1	0
Penata Layanan Operasional	7	1	1	0
Pengolah Data dan Informasi	6	3	3	0

Keterangan:

KLS : Kelas Jabatan

K : Peta Jabatan

B : *Bezzeting/ Existing* Pegawai

F : Formasi

## 18. Direktorat Pengendalian

No	Jabatan	K
1	JPT Pratama	1
2	Administrator	0
3	Pengawas	0
4	Fungsional	16
5	Pelaksana	5
Total		22

DIREKTUR PENGENDALIAN				
Jabatan	KLS	K	B	F
Analisis Kebijakan Ahli Madya	12	3	2	-1
Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	4	0	-4
Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8	5	2	-3
Arsiparis Penyelia	8	1	0	-1
Arsiparis Mahir	7	1	0	-1
Arsiparis Terampil	6	2	0	-2

Jabatan	KLS	K	B	F
Penelaah Teknis Kebijakan	7	1	1	0
Penata Kelola Pemerintahan	7	2	2	0
Penata Layanan Operasional	7	2	2	0

**Keterangan:**

KLS : Kelas Jabatan

K : Peta Jabatan

B : *Bezzeting/ Existing* Pegawai

F : Formasi

## 19. Direktorat Evaluasi

No	Jabatan	K
1	JPT Pratama	1
2	Administrator	0
3	Pengawas	0
4	Fungsional	16
5	Pelaksana	4
Total		21

DIREKTUR EVALUASI				
Jabatan	KLS	K	B	F
Analisis Kebijakan Ahli Madya	12	3	1	-2
Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	4	0	-4
Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8	5	2	-3
Arsiparis Penyelia	8	1	0	-1
Arsiparis Mahir	7	1	0	-1
Arsiparis Terampil	6	2	1	-1
Jabatan	KLS	K	B	F
Penelaah Teknis Kebijakan	7	2	2	0
Pengawas Pendataan Statistik	7	1	1	0
Pengelola Layanan Operasional	6	1	1	0

### Keterangan:

KLS : Kelas Jabatan

K : Peta Jabatan

B : *Bezzeting/ Existing* Pegawai

F : Formasi

20. Direktorat Pengukuran Pelembagaan Pancasila

No	Jabatan	K
1	JPT Pratama	1
2	Administrator	0
3	Pengawas	0
4	Fungsional	21
5	Pelaksana	8
Total		30

DIREKTUR PENGUKURAN PELEMBAGAAN PANCASILA				
Jabatan	KLS	K	B	F
Analisis Kebijakan Ahli Madya	12	3	1	-2
Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	3	0	-3
Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8	4	2	-2
Statistisi Ahli Madya	11	2	0	-2
Statistisi Ahli Muda	9	2	0	-2
Statistisi Ahli Pertama	8	3	0	-3
Arsiparis Penyelia	8	1	0	-1
Arsiparis Mahir	7	1	0	-1
Arsiparis Terampil	6	2	1	-1
Jabatan	KLS	K	B	F
Penelaah Teknis Kebijakan	7	2	2	0
Pengawas Pendataan Statistik	7	5	5	0
Pengolah Data dan Informasi	6	1	1	0

Keterangan:

KLS : Kelas Jabatan

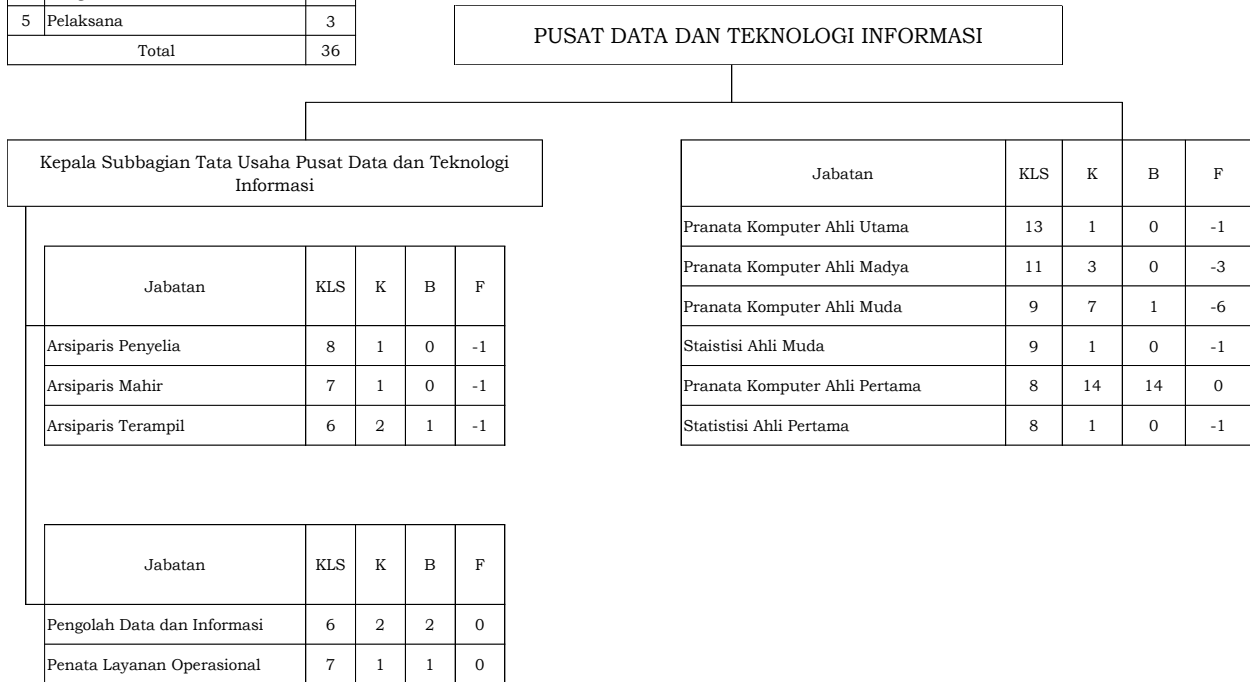
K : Peta Jabatan

B : *Bezzeting/ Existing* Pegawai

F : Formasi

## 21. Pusat Data dan Teknologi Informasi

No	Jabatan	K
1	JPT Pratama	1
2	Administrator	0
3	Pengawas	1
4	Fungsional	31
5	Pelaksana	3
Total		36



Keterangan:

KLS : Kelas Jabatan

K : Peta Jabatan

B : *Bezzeting/ Existing* Pegawai

F : Formasi

SEKRETARIS UTAMA,



TONNY AGUNG ARIFianto